

PDRB Pangandaran 2022 Kontribusi dari Pertanian Kehutanan dan Perikanan Masih Jadi Penyumbang Terbesar

Anton Atong Sugandhi - PANGANDARAN.JURNALNASIONAL.CO.ID

Mar 7, 2023 - 19:04



PANGANDARAN JAWA BARAT - Berdasarkan hasil perhitungan Product Domestic Regional Bruto (PDRB) tahun 2022, angka PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 13,163 T dengan kontribusi dari kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penyumbang terbesar.

Demikian dikatakan Bupati pangandaran H Jeje Wiradinata dalam pidato sambutannya saat menyampaikan penjelasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati pangandaran tahun 2022, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Pangandaran, Selasa (07/03/2023).

Disampaikannya bahwa, sesuai dengan amanat peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pasal 19 ayat (1) bahwa LKPJ disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Selanjutnya sesuai dengan regulasi tersebut bahwa substansi materi LKPJ tahun 2022 mengacu pada peraturan menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. oleh karena itu, pada kesempatan yang berharga ini, perkenankan kami menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban secara makro sebagai informasi atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan pemerintah daerah kabupaten pangandaran pada tahun 2022 , " Katanya.

Menurut Jeje, sebagaimana dalam peraturan daerah kabupaten pangandaran nomor 4 tahun 2021 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kabupaten pangandaran tahun [2021 - 2026](#), tertuang visi yang ingin kita capai, yakni "pangandaran juara menuju wisata berkelas dunia yang berpijak pada nilai karakter bangsa".

Secara utuh visi ini dapat dimaknai sebagai suatu konsep dan strategi pembangunan kekinian yang ditransformasikan menjadi konsep pembangunan kabupaten pangandaran sesuai dengan kondisi dan lingkungan strategis daerah.

Wisata berkelas dunia ini kita maknai sebagai kabupaten yang sumber daya wisatanya yang mendunia, mampu

mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kita bersama.

Untuk mendukung pencapaian visi ini, maka terdapat 6 (enam) misi yang kita jalankan bersama sejumlah strategi kebijakan. pada aspek pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, maka kami sampaikan bahwa APBD kabupaten pangandaran tahun 2022 telah ditetapkan tepat waktu," Ucapnya.

Selanjutnya Jeje memaparkan bahwa secara umum komponen anggaran pendapatan dan belanja daerah ini dapat dikategorikan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu :

1. Penerimaan daerah, terdiri dari pendapatan daerah yang merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, dan penerimaan pembiayaan daerah yang merupakan semua penerimaan yang harus dibayar kembali,.baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya;

2. Pengeluaran daerah, terdiri dari belanja daerah yang merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat, khususnya dalam memberikan pelayanan umum, serta pengeluaran pembiayaan daerah yang merupakan semua pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran terkait maupun pada tahun berikutnya.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Kenaikan dan penurunan pendapatan daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro nasional secara signifikan yaitu terhadap pendapatan asli daerah, terutama sektor pajak daerah.

Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, pemerintah kabupaten pangandaran secara kontinyu berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor yang memiliki potensi tinggi.

Pendapatan daerah terdiri atas 3 kelompok yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan yakni DAU, DAK, dan bagi hasil pajak dan bukan pajak dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pada tahun 2022, penerimaan dari pendapatan asli daerah yang direncanakan sebesar Rp. [296.136.212.846,00](#) (dua ratus sembilan puluh enam milyar seratus tiga puluh enam juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah). Terealisasi sebesar Rp. [256.840.281.294,97](#) (dua ratus lima puluh enam milyar delapan ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh empat koma sembilan puluh tujuh perak rupiah) atau 86,73%.

Sedangkan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2021 sebesar Rp. [175.150.518.912,00](#) (seratus tujuh puluh lima milyar seratus lima puluh juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus dua belas rupiah).

Hal tersebut terdapat peningkatan sebesar 47%. Kenaikan pendapatan asli daerah ini merupakan salah satu upaya dari kebijakan kepala daerah yaitu dengan membentuk perangkat daerah baru, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di awal tahun 2022.

Kenaikan pendapatan ini terus kita upayakan dan optimalkan dengan pemanfaatan teknologi terkini yang diterapkan oleh Bapenda terhadap objek pajak.

Selanjutnya, dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah.

Dana perimbangan ini terdiri dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).

Penerimaan dari dana perimbangan pada tahun 2022 direncanakan sebesar Rp. [812.058.811.727,00](#)

(delapan ratus dua belas milyar lima puluh delapan juta delapan ratus sebelas ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dan terealisasi sebesar

Rp. [787.675.253.146,50](#) (tujuh ratus delapan puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu seratus empat puluh enam koma lima puluh perak rupiah) atau mencapai 97%.

Selanjutnya, belanja daerah pemerintah kabupaten pangandaran tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 1.895.098.261.143,00 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh lima milyar sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh satu ribu seratus empat puluh tiga rupiah)

dan dapat direalisasikan Rp. 1.444.307.540.601,00 (satu triliun empat ratus empat puluh empat milyar tiga ratus tujuh juta lima ratus empat puluh ribu enam ratus satu rupiah) atau mencapai 76,21%.

Hadirin yang saya hormati; selanjutnya dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah, dengan mengacu pada indikator kinerja makro yang didukung oleh seluruh perangkat daerah, maka berbagai upaya pencapaian indikator kinerja tersebut yang telah dijalankan dan dicapai pada tahun 2022, antara lain : Berdasarkan hasil perhitungan PDRB tahun 2022, angka PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 13,163 t dengan kontribusi dari kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penyumbang terbesar.

Sedangkan pada tahun 2021, angka PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 12,129 t. hal tersebut terdapat peningkatan sebesar 0,0009%.

Selanjutnya, kabupaten pangandaran mengalami penurunan angka kemiskinan diangka -3,42% yaitu di tahun 2021

bernilai 9,65 menjadi 9,32 di tahun 2022.

Hal ini merupakan salah satu konsen kita bersama untuk membangun masyarakat pangandaran yang lebih sejahtera.

Selanjutnya, persentase rekapitulasi penyerapan anggaran dari perangkat daerah kabupaten pangandaran yaitu diangka 76,23% dengan target anggaran sebesar Rp1.894.862.041.143.,00 (satu triliun delapan ratus sembilan empat milyar delapan ratus enam puluh dua juta empat puluh satu ribu seratus empat puluh tiga rupiah) dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.444.400.724.802,00 (satu triliun empat ratus empat puluh empat milyar empat ratus juta tujuh ratus dua puluh empat ribu delapan ratus dua rupiah).

Berbagai inovasi juga terus dilakukan antara lain di sektor pelayanan publik yaitu dengan dibangunnya Mal Pelayanan Publik (MPP) yang nantinya akan menjadi pusat layanan perijinan terpadu dan diharapkan dapat mempercepat proses pelayanan publik masyarakat pangandaran.

Saudara sekalian yang berbahagia, berbagai keberhasilan baik pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik tentunya masih ada hal yang harus kita benahi dan kerjakan bersama.

Oleh karena itu, apresiasi dan terima kasih atas segala pengabdian, kemitraan, dan sinergi yang baik selama ini kami sampaikan kepada seluruh masyarakat kabupaten pangandaran, pimpinan beserta seluruh anggota DPRD kabupaten pangandaran, Forkopimda, TNI/Polri, Pejabat dan seluruh aparatur pemerintah kabupaten pangandaran serta kepada insan pers dan lembaga swadaya masyarakat.

Mari kita terus bahu membahu, menjalin kekompakan dan harmonisasi dalam membangun

kabupaten pangandaran yang kita cintai ini.

Demikian penjelasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2022 ini, yang mana ini merupakan tahun kedua kami sejak dilantik sebagai bupati pangandaran pada tahun 2021 yang lalu," Ujarnya. (Anton AS)